



Kajian Keruangan Penempatan Lokasi Masjid Agung Cipaganti di Kawasan Permukiman Kolonial Belanda Bandung

Denny Santika

Sejarah Peradaban Islam

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

dennysantika@gmail.com

- **Received:** 23.05.2025
- **Accepted:** 14.06.2025
- **Published:** 01.07.2025

Abstract: *The Cipaganti Grand Mosque is located in the Cipaganti area of North Bandung. It was designed by Prof. Ir. C.P. Wolff Schoemaker and established in 1933, during the period when Bandung was designated as a gemeente (between 1906–1940). This study aims to explore the background behind the location of the Cipaganti Grand Mosque within a Dutch Colonial residential area and to understand the mosque's status. This is important in order to identify patterns in the placement of places of worship or mosques in colonial settlements, as well as the relationship between the Cipaganti Grand Mosque and the local community in the colonial residential area, and with other religious buildings in the Cipaganti area. The study focuses on spatial aspects at a semi-micro or meso scale, using a descriptive-analytical method and inductive reasoning. The core idea of this research identifies three factors that influenced the location of the Cipaganti Grand Mosque. First, the establishment of the mosque within a Dutch Colonial residential area was influenced by the ethical policy and association policy. Second, it served to meet the religious needs of the Muslim community living in the Cipaganti area. Third, it functioned as a supporting facility for worship for employees working in near by institutions or agencies.*

Keywords: *Mosque, Colonial Settlement, Meso Micro Scale Space, Gemeente, Bandung.*

Abstrak: Masjid Agung Cipaganti terletak di kawasan Cipaganti Bandung Utara yang dirancang oleh Prof. Ir. C.P. Wolff Schoemaker dan didirikan pada tahun 1933 ketika Kota Bandung menjadi *gemeente* (antara tahun 1906-1940). Penelitian ini bermaksud untuk menjawab apakah yang melatarbelakangi letak Masjid Agung Cipaganti pada Pemukiman Kolonial Belanda dan bagaimana status masjid tersebut. Hal ini penting untuk mengidentifikasi pola penempatan tempat ibadah/masjid di permukiman kolonial, hubungan Masjid Agung Cipaganti dengan masyarakat di permukiman kolonial dan dengan bangunan keagamaan lainnya di kawasan Cipaganti. Kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan aspek spasial skala semi mikro/meso dengan metode deskriptif analitis dan alur penalaran induktif. Inti gagasan dari penelitian ini terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi keletakan Masjid Agung Cipaganti. Pertama, berdirinya masjid ini di Permukiman Kolonial Belanda dipengaruhi kebijakan politik etis dan asosiasi. Kedua, untuk memfasilitasi kebutuhan ibadah masyarakat muslim yang bermukim di kawasan Cipaganti. Ketiga, sebagai fasilitas

pendukung ibadah bagi para pekerja di instansi atau lembaga yang berdekatan dengan masjid.

Kata Kunci: Masjid, Permukiman Kolonial, Kerungan Skala Meso Mikro, *Gemeente*, Bandung.

1. Pendahuluan

Pengertian arkeologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari keadaan sosial budaya masa lampau melalui tinggalan materi, dengan tujuan untuk merekonstruksi aspek-aspek kehidupan tersebut.¹ Ringkasnya, arkeologi mempelajari masa lampau melalui sisa-sisa tinggalan material. Arkeologi memiliki tiga paradigama utama, yaitu: *pertama* rekontruksi sejarah kebudayaan, *kedua* rekonstruksi cara-cara hidup masa lampau, dan *ketiga* rekonstruksi proses perubahan suatu kebudayaan dan faktor-faktor yang menyebabkannya.²

Berdasarkan periodisasi arkeologi memiliki kajian yang beragam, di antaranya kajian Arkeologi Islam dan Kolonial, yang di Indonesia kajian Arkeologi Islam mengawali kajian Arkeologi Kolonial. Di antara pokok bahasan Arkeologi Islam yaitu membahas tentang masjid. Dalam istilah arkeologi, masjid termasuk *living monument*, karena bangunan tersebut masih tetap digunakan sesuai dengan fungsi semula ketika bangunan itu dibuat.³

Pengertian masjid secara umum adalah bangunan yang menghadap kiblat (Ka'bah) yang digunakan umat Islam sebagai pusat kegiatan ibadah baik *mahdhoh* maupun *ghairu mahdhoh*, dan segala kegiatan yang berkaitan dengan tradisi dan kebudayaan Islam. Masjid hadir dari segenap kemampuan yang dimiliki masyarakat dan representasi dari komunitas Islam yang melahirkan dan memakmurkannya.⁴

Menurut fungsi dan bentuknya, masjid mempunyai beberapa istilah penamaan. *Masjid jami* adalah masjid yang biasa digunakan untuk Shalat Jumat. Dikenal juga istilah *memorial mosque* yaitu masjid yang digunakan sebagai tanda peringatan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam, seperti Masjid Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al Aqso di Palestina.⁵

Kemudian ada pula masjid makam atau *masyad*, yaitu masjid yang didirikan pada kompleks pemakaman, seperti Masjid Sendang Duwur di Lamongan dan Masjid Astana Gunung Jati di Cirebon. Dikenal pula masjid agung (di Jawa), masjid raya (di Sumatera) atau masjid negara yang biasanya terletak di pusat pemerintahan dan

¹ J. Robert Sharer dan Wendy A., *Archaeology: Discovering Our Past* (Boston: Mc Graw Hill, 2003). Hal. G-7.

² Ph Subroto, "Metodologi Studi Permukiman di Indonesia", Dalam *Makalah Arkeologi Permukiman UGM Yogyakarta* (1999).

³ Tim Penyusun, *Masjid Kuno Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999).

⁴ M. Iskandar, Syaom Barliana, "Tradisionalitas dan Modernitas Tipologi Arsitektur Masjid", *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur*, 32.2 (2004), 110 - 118.

⁵ Tim Penyusun, Op. Cit., Hal. 7.

menjadi simbol kekuasaan. Masjid madrasah yaitu masjid yang sekaligus dapat digunakan sebagai tempat pendidikan. Jenis masjid yang lain adalah masjid pesantren dan masjid wanita. Masjid pesantren adalah masjid yang terletak di lingkungan pesantren, sedangkan masjid wanita adalah masjid yang dibangun untuk memfasilitasi kegiatan kaum perempuan. Sebagai contoh adalah *Masjid Isteri* di Kauman, Yogyakarta dan *Masjid Isteri* di Kampung Pekalongan, Garut yang didirikan pada tanggal 1 Februari 1926.⁶

Masjid di Indonesia khususnya di Jawa memiliki beberapa tipe, di antaranya:

1. tipe yang berdasarkan bangunan tradisional,
2. tipe yang sudah terpengaruh oleh arsitektur asing, dan
3. tipe bangunan modern.⁷

Pengertian Masjid Tradisional ialah bangunan masjid yang masih mengikuti bangunan (perumahan) masyarakat yang masih tergantung pada adat dan lingkungan alamnya. Masjid tradisional ini tidak hanya berdasarkan bentuk bangunan tradisional, tetapi juga memperhatikan konsep dan aspek-aspek lain, seperti: keletakan serta bagian dan bahan komponen bangunannya (berbahan bambu, kayu, ijuk, rotan, bata alami, dan bahan tradisional lainnya). Tipe bangunan yang sudah terpengaruh oleh arsitektur asing adalah bangunan masjid tradisional yang tidak sepenuhnya berciri khas unsur lokal atau adat. Akan tetapi, telah terpengaruh oleh arsitektur asing baik dari segi komponen bangunannya atau bahkan bagian interior dan eksteriornya. Pada tipe bangunan tersebut proporsi arsitektur bangunan tradisional masih dapat terlihat. Selanjutnya, tipe bangunan masjid modern, yaitu masjid yang dibangun berdasarkan pembaruan dan kecocokan pola pikir antara subjek dengan objeknya yang berkaitan erat dengan ruang dan waktu, dan di dalamnya terdapat paham-paham modernisme. Objek kajian yang diteliti adalah Masjid Agung Cipaganti di permukiman kolonial, Kota Bandung. Masjid ini termasuk pada tipe masjid kedua, yaitu masjid dengan tipe yang telah terpengaruh oleh unsur asing. Masjid tersebut dibangun pada tanggal 11 Syawal 1351 H (7 Februari 1933) di Permukiman Kolonial Belanda, Bandung.

Bangunan Masjid Agung Cipaganti telah terpengaruh oleh langgam arsitektur yang berkembang di Eropa. Akulturasi antara budaya lokal dan luar telah terjadi, sehingga terdapat perpaduan langgam arsitektur khas bangunan tradisional atau lokal dengan Eropa. Atap bangunan masjid tersebut berbentuk *tajug* dalam istilah Orang Sunda dan *joglo* dalam istilah Orang Jawa. Salah satu komponen interior bangunan bergaya Eropa pada masjid ini dapat dilihat pada lampu hias ruang utama masjid yang terbuat dari logam kuningan.

Keletakan masjid pada umumnya berada di sebuah komunitas yang tinggal di permukiman. Pengertian permukiman menurut Inajati Adrisijanti adalah suatu proses bermukimnya manusia di suatu tempat dengan menyesuaikan pada keadaan sumber

⁶ Ibid.

⁷ Mundzirin Yusuf Elba, *Mesjid Tradisional di Jawa*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983). Hal. 1-2.

daya alam, seperti sumber air, kesuburan tanah, atau setiap unsur yang memenuhi kebutuhan hidup. Permukiman adalah suatu proses bermukimnya manusia dalam mengatur dirinya untuk tinggal yang mengacu pada tempat tinggalnya, susunan bangunan, dan sifat bangunan. Di sebuah permukiman akan terlihat bentuk bangunan tempat tinggal, pola penempatan, dan termasuk pengaturan aktivitas komunitasnya. Permukiman kolonial merupakan permukiman yang diwarnai dengan latar belakang budaya dan terdapat juga salah satu agama atau religi dari negara induk di luar wilayah asalnya.

Permukiman akan senantiasa hadir sebagai komponen dari setiap kota. Kota dalam arti luas adalah suatu permukiman yang tumbuh karena adanya unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, kultural, dan mempunyai pengaruh timbal balik dengan daerah lain.⁸ Latar belakang munculnya perkotaan di Jawa diperkirakan telah dimuali sejak masa klasik, tetapi struktur bangunan dan pola keruangan kotanya belum teridentifikasi secara jelas. Hal ini pernah dilakukan oleh Maclaine Point yang mencoba merekonstruksi tata ruang Kerajaan Majapahit. Pada masa Islam di Jawa, kota telah memiliki pola keruangan dan tata letak yang teridentifikasi dengan jelas. Kota-kota Islam tersebut tumbuh berkembang menjadi perkotaan modern setelah Indonesia di bawah kekuasaan Kolonial Belanda.

Permukiman Kolonial Belanda di Kota Bandung berkembang pada awal abad ke-20an, ketika telah berstatus *gemeente*. Sebelum berstatus *gemeente*, Bandung merupakan sebuah desa di Kabupaten Priangan yang belum memiliki kelengkapan insprastruktur yang baik. Bandung tumbuh berkembang menjadi sebuah daerah kota yang ramai terjadi pada pertengahan tahun 1811 M. Hal ini seiring dengan adanya kebijakan Gubernur Jenderal Willem Daendels membuat jalan *Groote Postweg* dari Anyer sampai Panarukan yang membentang ± 1000 kilometer pada tahun 1808-1811 M. Dengan alasan strategis, Deandels pada tanggal 25 Mei 1810 memutuskan ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Karapyak ke daerah Cikapundung Bandung.⁹

Kota Bandung mengalami perkembangan yang signifikan pada abad ke-20. Ir. Thomas Karsten dan Bupati Martanegara (menjabat Kepala Pemerintahan Kabupaten Bandung 1893-1906 M) memberi andil besar pada pengembangan dan perancangan tata ruang Kota Bandung.¹⁰ Kemudian di tahun 1929-1940 M, pemerintah Belanda sangat gencar mendirikan beberapa bangunan berlanggam arsitektur khas Eropa terutama di Kota Bandung Utara. Kota Bandung berbenah melengkapi bangunan sarana dan prasarana kota. Bangunan-bangunan seperti gedung pemerintahan, hotel-hotel, bank, observatorium, bangunan ibadah, permukiman, vila menghiasi Kota

⁸ Oerip Bramantyo Boedi, "Tata Kota Bandung Masa Awal", *Jurnal Mozaik Arkeologi Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) Jawa Barat*, (2003), 119.

⁹ Djefry W. Dana, *Ciri Perancangan Kota Bandung* (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1990). Hal. xi, 13.

¹⁰ *Ibid.*, Hal. 16

Bandung. Pembangunan kompleks hunian untuk penduduk Eropa juga menjadi agenda pembangunan pada saat itu.¹¹

Latar belakang penempatan Masjid Agung Cipaganti yang berada di Permukiman Kolonial Belanda –dibangun oleh Arsitek Belanda yang bernama Prof. C.P. Woff Schoemaker yang dibantu Kramisch Laboratorium– sangat menarik untuk diteliti. Arsitek Prof. Ir. C.P.W. Schoemaker ternyata memiliki peran penting dalam merancang beberapa bangunan lainnya di Bandung. Beberapa karya beliau, seperti Villa Isola (1932), Gedung Kolodgam (1919), Kodam Siliwangi III, Gereja Cathedral (1922), Gereja Protestan Bethel (1925), Vila Merah (1922), Masjid Agung Cipaganti.¹²

Pada umumnya keletakan masjid di Indonesia berada di sebuah komunitas yang mayoritas beragama Islam. Lokasi penempatan masjid bervariasi, ada yang dibangun di pusat kota, di wilayah-wilayah administratif dari lingkup terbesar sampai terkecil. Masjid juga didirikan di tempat pendidikan (pesantren, universitas-universitas tertentu), dan bahkan berada di areal perkantoran. Pendirian Masjid Agung Cipaganti di Permukiman Kolonial Belanda menarik untuk diteliti karena ditinjau dari aspek keruangan dan arkeologis, penempatan dan statusnya patut untuk dipertanyakan.

Berbagai karya tulis ilmiah telah banyak membahas mengenai Masjid Agung Cipaganti dari perspektif yang beragam. Endro Adiwirawan (2017) mengeksplorasi korelasi spasial antara kegiatan ritual ibadah berjamaah dalam arsitektur bangunan masjid. Husna Izzati, dkk. (2021) menjelaskan bahwa akulturasi budaya Islam secara eksplisit dapat ditemukan secara menyeluruh pada komponen-komponen arsitektur bangunan cagar budaya masjid ini, yaitu: budaya Islam, Eropa Barat, Jawa, dan Sunda. Zulva Fachrina (2017) membahas kajian aspek arsitektur pada bangunan masjid, yang menekankan pengaruh langgam arsitektur Eropa yang berpadu dengan tradisional Jawa pada bangunan masjid ini. Dewi Retno Prameswari dkk. (2021) mengungkap bahwa desain rancangan awal bangunan masjid ini berpola simetris sebagaimana ciri khas karakteristik karya arsitek C.P. Wolff Schoemaker, dengan modul kelipatan 2,5 - 3 m dalam rancangan desain denah bangunan masjid dan 1,5 dalam tinggi massa bangunan. Kajian ini dapat membantu proses kegiatan inventarisasi dan konservasi bangunan cagar budaya di masa mendatang.

Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kajian budaya, arsitektur dan teknik, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada kajian arkeologi keruangan (*spatial archaeology*), yang menekankan pada latar belakang budaya materi (arkeologis) kemudian dikaitkan dengan gejala politik, ekonomi, sosial-budaya yang sedang berlangsung pada awal abad ke-20 sampai dekade keempat abad ke-20. Kajian arkeologi keruangan berupaya menjelaskan keterkaitan fenomena latar belakang keletakan bangunan Masjid Agung Cipaganti di Permukiman Kolonial Belanda belum

¹¹ Haryoto Kunto, *Wajah Bandoeng Tempo Doeloe* (Bandung: PT. Granesia, 1985).

¹² Djefry W. Dana, *Op. Cit.*, Hal. 81-83.

pernah ada yang membahas. Hal ini penting untuk dikaji karena dapat memberikan pemahaman sejarah yang mendalam serta memperkaya kajian tentang Masjid Agung Cipaganti.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat obyek yang diteliti. Fenomena analisis deskriptif yaitu bentuk pembuktian terhadap dua bentuk temuan, yaitu permasalahan dan objek sebagai permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode penalaran Induktif. Logika Induktif adalah cara penarikan kesimpulan dari kasus-kasus khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.¹³

Dengan penerapan metode ini diharapkan dapat menjabarkan beberapa fenomena menarik dari bangunan Masjid Agung Cipaganti yang sebelumnya tidak diketahui latar belakang konsep penempatan keruangnya. Tinjauan keruangan pada penelitian ini bersifat semi mikro. Tinjauan keruangan secara semi mikro adalah mempelajari pola sebaran dan hubungan antar bangunan di dalam suatu situs, serta hubungan antara bangunan-bangunan dengan kondisi lingkungan dan sumber daya alam.¹⁴

Penelaahan lebih lanjut adanya keterikatan antara bangunan Masjid Agung Cipaganti dengan Permukiman Kolonial Belanda dalam aspek temporal dan spasial merupakan sebuah konteks utuh yang harus diinterpretasikan lebih lanjut. Interpretasi terhadap objek tersebut semakin menyeluruh bila konteks yang melingkupinya terjelaskan dengan baik.

3. Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 21 Pebruari 1906 menetapkan Bandung menjadi *gemeente* (hak untuk mengatur kota sendiri sebagai kota praja/kotamadya). Semenjak menjadi *gemeente*, kota ini mengalami masa keemasan (*the golden age*) yang berlangsung dalam kurun waktu 10 tahun (1920-1930-an).¹⁵

Perubahan menjadi *gemeente* ini menjadikan Kota Bandung sebagai salah satu kota modern di Jawa. Beragam fasilitas sarana dan prasarana menarik disediakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Setelah berubah menjadi *gemeente* peningkatan jumlah penduduk semakin pesat (*densely populated region*),

¹³ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001). Hal. 155.

¹⁴ Inajati Adrisijanti, *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam* (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2000). Hal. 29.

¹⁵ Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1906 No. 121

berbeda dengan kondisi sebelumnya yang masih jarang penduduk (*sparsely populated region*).¹⁶

Kemudahan para pendatang mengunjungi Bandung juga didukung oleh salah satu faktor terpenting, yaitu akses transportasi yang mudah. Terbukanya akses kereta api ke berbagai daerah berperan dalam meningkatkan perkembangan jumlah penduduk Bandung lebih banyak di setiap tahunnya. Pada awal pemerintahan *gemeente* jumlah penduduk Kota Bandung tercatat sebanyak 47.391 jiwa. Peningkatan penduduk terlihat jelas setelah kurun waktu empat belas tahun jumlahnya melonjak berkali lipat menjadi 102.227 jiwa. Lonjakan jumlah penduduk di tahun 1920 ini adalah yang tertinggi pada saat Bandung menjadi *gemeente*. Jumlah penduduk Eropa menduduki peringkat terbesar kedua setelah pribumi.¹⁷

Fenomena perkembangan pesat kependudukan di Kota Bandung diperlukan penanganan tata ruang kawasan yang dapat memfasilitasi berbagai permasalahan mendasar, seperti: sewa rumah yang mahal, padatnya perumahan, dan sanitasi air yang buruk. Oleh karena itu, Ir. Thomas Karsten merancang tata ruang Kota Bandung dengan konsep *Plan Karsten*. Konsep perancangan ini dikenal dengan istilah *tuinstad/garden city* yang menitikberatkan pada perluasan wilayah kota, pemenuhan sarana hunian permukiman, fasilitas-fasilitas publik, dan pertamanan.¹⁸

Pemerintahan *Gemeente* Bandung pada tahun 1910-an secara bertahap mulai mengadakan perluasan wilayah ke bagian utara kota. Untuk membuka akses jalan menuju utara, pemerintah membuat jalan penghubung menuju bagian utara tersebut. Jalan tersebut bernama Cipaganti dan Dago, keduanya merupakan sarana jalan yang menghubungkan daerah pusat kota dengan bagian utara Kota Bandung.

Pada tanggal 1 April 1906 wilayah Kota Bandung mempunyai luas 1.922 ha, dengan luas tanah yang ditempati 240 ha.¹⁹ Pada tahun 1911 perluasan Kota Bandung kembali bertambah, sehingga luas wilayahnya secara keseluruhan berkembang menjadi 2150 ha dengan luas tanah yang ditempati bangunan 300 ha.²⁰

Setelah pengupayaan perluasan wilayah kota, Pemerintah Kota Bandung melakukan penataan keruangan kota, pengadaan sarana sosial, dan modernisasi wajah kota mulai dilaksanakan pada tahun 1915. Penataan kota semakin mendapat perhatian lebih setelah muncul rencana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung tahun 1917. Tindak lanjut dari rencana tersebut, kemudian dipersiapkan pembangunan beberapa kompleks perkantoran permukiman untuk para pegawai. Di antara bangunan yang paling ikonik selesai dibangun yaitu Gedung

¹⁶ Reiza D. Dienaputra, "Bandung 1906 – 1970: Studi Tentang Perkembangan Ekonomi Kota", *Artikel* diunduh dari <https://pustaka.unpad.ac.id/archives/86437>, (diakses pada tanggal 23 Mei 2025).

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Djefry W. Dana, Op. Cit., Hal. 16.

¹⁹ Badan Pusat Statistik Kota Bandung, *Bandung dalam Angka* (Bandung: Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2005).

²⁰ Djefry W. Dana, Op. Cit., Hal. 19.

Sate, selesai dibangun tahun 1924. Di sekitar Gedung Sate ini, dibangun juga kompleks perumahan pegawai dan perkantoran untuk instansi pusat, seperti kantor *Departement van Justitie* (Departemen Kehakiman), *Departement van Verkeeren en Waterstaat* (Departemen Perhubungan dan Pengairan), *Departement van Financien* (Departemen Keuangan), *Departement van Binnenlandsch Bestuur* (Departemen Dalam Negeri), *Hoge Raad* (Mahkamah Agung), dan kantor *Volksraad* (Dewan Rakyat).²¹

Kompleks perumahan untuk para pegawai pemerintah dan beberapa gedung perkantoran berhasil dibangun. Akan tetapi, pada akhirnya rencana pemindahan pusat ibu kota Hindia Belanda itu tidak jadi dilaksanakan disebabkan resesi ekonomi dunia tahun 1930-an. Tenggang waktu yang dipergunakan untuk mempersiapkan semuanya berlangsung lebih dari tujuh tahun, sejak tahun 1918-1925. Dari persiapan tersebut telah berhasil dibangun sebanyak 400 hingga 750 bangunan rumah modern yang direncanakan sebagai tempat tinggal para pegawai pemerintah pusat.²²

Awal Permukiman Kolonial Belanda di Kota Bandung

Pemerintah *Gemeente* Bandung berupaya memenuhi kebutuhan permukiman akibat jumlah penduduk yang semakin bertambah. Penataan kawasan permukiman dipisahkan antara orang Eropa, orang Cina dan Timur Asing, serta permukiman untuk orang-orang pribumi. Di setiap daerah permukiman kota terdapat pengklasifikasian berdasarkan kelompok, seperti penduduk Eropa, Cina (*Chinesche Wijk*) atau lebih dikenal dengan *pecinan*, daerah permukiman orang Arab (*Arabische Wijk*), dan permukiman pribumi. Pengklasifikasikan kompleks pemukiman ini dapat diidentifikasi lewat tinggalan toponim berupa nama kawasan.²³

Kawasan permukiman masyarakat Kolonial Belanda berlokasi tidak jauh dari bangunan-bangunan pemerintahan dan fasilitasnya (sebagai *civic center*), permukiman yang di dalamnya berdiri rumah-rumah berpekarangan luas, serta berbagai fasilitas umum dan bangunan komersial. Karakter fisik bangunan rumah di permukiman ini lebih besar dari pribumi, bersifat permanen, tidak padat, bergaya arsitektur modern, dan dilengkapi sarana fasilitas yang baik.²⁴

Kompleks permukiman Eropa pertama yang dibangun pemerintah *gemeente* terletak di daerah Andir atau di sekitar lapangan terbang Andir. Keletaknya sangatlah strategis yang berdekatan dengan bandara. Permukiman Eropa ini dikenal dengan sebutan *Fokkerhuis*. Permukiman modern Eropa lainnya dibangun *gemeente* bersama-sama dengan pihak swasta di sekitar Kosambi (Halte Cikudapateuh), Taman Pramuka

²¹ Haryoto Kunto, *Semerbak Bunga di Bandung Raya* (Bandung: PT. Granesia, 1986). Hal. 93-97.

²² Reiza D. Dienaputra, Op. Cit., Hal. 200.

²³ Patricia Petty Paramastri, Skripsi: "Perkembangan Tata Kota Malang Masa Kolonial (1914-1940)" (Yogyakarta: UGM, 2002), Hal. 29.

²⁴ Johan Silas, "Perjalanan Panjang Indonesia dalam dan Sekitar Abad XX". Dalam *Kota Lama, Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan* (Jakarta: Penerbit Ombak, 2003). Hal. 9.

Denny Santika

(*Oranje Plein*), serta Jalan Merdeka sampai *Grote Postweg*. Perumahan bertingkat yang didirikan di *Oranje Plein* terkesan lebih mewah dibandingkan bangunan-bangunan perumahan yang dibangun di Andir.²⁵

Kawasan permukiman untuk Eropa juga dibangun di sekitar *Insulinde Park* (sekarang Taman Lalu Lintas Ade Irma), tepatnya di jalan (Jl. Riau, Jl. Aceh, Jl. Jawa, Jl. Sumatera, Jl. Kalimantan). Perencanaan permukiman ini dilakukan oleh tim teknis di bawah pimpinan Kolonel Purnawirawan Zeni Militer Belanda V.L. Slors (seorang Direktur Dinas Bangunan *Gemeente* Bandung). Permukiman ini dibangun sejak tahun 1918 yang difungsikan sebagai pusat aktivitas masyarakat Eropa sebelum berkembang menuju Bandung.²⁶

Permukiman Kolonial Belanda di Kawasan Bandung Utara (Cipaganti)

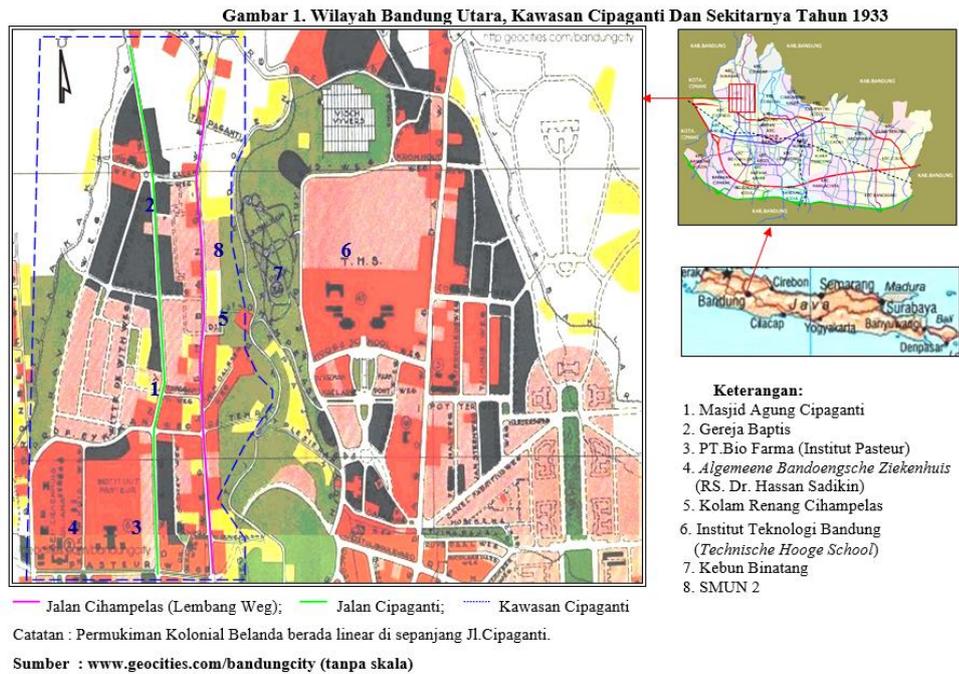
Kompleks Permukiman Kolonial Belanda di Cipaganti terletak di dataran tinggi Kota Bandung. Permukiman ini dibangun pada tahun 1918-an yang terkonsentrasi di sepanjang Jl. Cipaganti, Jl. Dago, *Van Houtenweg*, dan Jl. Dipati Ukur yang menuju ke arah Lembang. Di sepanjang jalan tersebut terdapat bangunan rumah dan vila yang dihuni oleh orang-orang Eropa.

Pada tahun 1929-1940 pemerintah *gemeente* melakukan pembangunan sarana fasilitas yang mendukung permukiman di Jalan Cipaganti. Kawasan permukiman ini berdekatan dengan berbagai fasilitas umum. Bangunan Rumah Sakit Hasan Sadikin, Rumah Sakit Advent, sarana rekreasi (kolam renang Cihampelas dan kebun binatang), pasar, gereja, masjid, bangunan militer/keamanan, gedung sekolah (SMAN 2 Cihampelas), dan kantor pos dibangun di sekitar kawasan permukiman ini.

Pola Permukiman Kolonial Belanda di Cipaganti direncanakan dengan seksama untuk memenuhi kebutuhan hidup primer, sekunder, maupun tersier setiap penghuninya. Karakteristik kawasan permukimannya terkesan lebih stabil yang terdiri dari bangunan-bangunan modern. Di dalamnya terdapat beberapa lembaga atau institusi seperti markas tentara, pusat ekonomi (pasar tradisional) sebagai aktivitas dagang antara penguasa kolonial yang menjalin kerjasama dengan penguasa pribumi dalam bentuk perjanjian. Lokasi permukiman kolonial ini tersusun secara linear yang berada di sepanjang Jalan Cipaganti.

²⁵ Reiza D. Dienaputra, Op. Cit., Hal. 199.

²⁶ Haryoto Kunto, Op. Cit., 1985. Hal. 65.



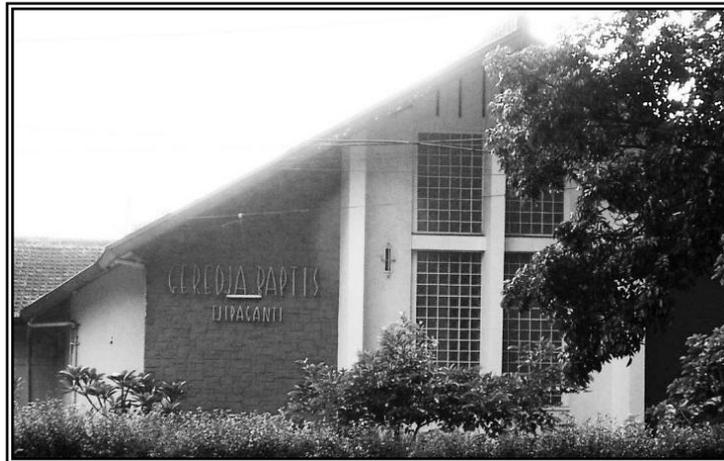
Gambar 1. Wilayah Bandung Utara
Sumber : www.geocities.com

Secara umum tata ruang Permukiman Kolonial Belanda di Bandung Utara terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Bangunan peribadatan untuk umat Kristen Protestan yaitu Gereja Baptis Tjipaganti, yang berada di Jalan Cipaganti. Gereja Baptis ini dibangun semasa dengan Masjid Agung Cipaganti tepatnya setelah munculnya Permukiman Kolonial Belanda. Sarana peribadatan untuk umat Islam (Masjid Agung Cipaganti) berada di barat Jalan Cipaganti No. 85.



Gambar 2. Masjid Agung Cipaganti dengan latar Gunung Tangkuban Perahu tahun 1933, difoto dari arah tenggara
Sumber: Arsip Bandung Heritage



Gambar 3. Gereja Baptis Tjipaganti yang berada di Jalan Cipaganti difoto dari arah utara

Sumber: Dokumentasi Pribadi

b. Bangunan Industri

Zona industri berada di timur dan di baratdaya permukiman. Tepatnya di Jalan Cihampelas, terdapat industri tekstile yang sekarang berubah fungsi menjadi pusat perbelanjaan yang dikenal dengan nama *Cihampelas Walk* (Ciwalk). Industri tekstil berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomian Bandung yang semakin membaik. Tahun 1933, Departemen Perekonomian Hindia Belanda mendirikan *Textiel Inrichtieng Bandoeng* dengan modal awal 1300 alat tenun tangan dan 50 mesin tenun mekanis.

Di bidang industri farmasi terdapat *Pasteur Institute* (1926), sebuah lembaga penelitian yang memproduksi vaksin dan serum (sekarang menjadi PT. Bio Farma) yang berada di sebelah barat daya kawasan permukiman Cipaganti. Industri farmasi ini termasuk industri farmasi terbesar di Kota Bandung. Bangunan industri lainnya, yaitu Pabrik Kina (*Bandoensch Kinine fabriek N. V.* 1915) terletak di selatan permukiman Cipaganti yang memproduksi garam kina/obat malaria.



Gambar 4. Bangunan Bio Farma, lembaga yang menghasilkan produk farmasi dibangun tahun 1915, difoto dari arah tenggara

Sumber: Dokumentasi Pribadi

c. Bangunan Perniagaan, Perkantoran, dan Militer

Bangunan perniagaan berada di barat laut. Lokasi ini adalah sentral pasar tradisional. Pusat perniagaan lainnya berada di sekitar Jalan Cihampelas. Areal Perkantoran terletak di selatan dan baratdaya permukiman. Kemudian di sebelah barat permukiman terdapat Kantor Komando daerah Militer III Siliwangi dan kompleks perumahan militer.



Gambar 5. Komando Daerah Militer (Kodam) III Siliwangi, difoto dari arah timur
Sumber: Dokumentasi Pribadi

d. Bangunan Hiburan, Pendidikan, dan Kesehatan

Di sebelah barat Permukiman Cipaganti terdapat tempat hiburan dan rekreasi seperti kolam renang Cihampelas dan Kebun Binatang. Sarana pendidikan terletak di barat permukiman, seperti SMUN 2 Bandung, SMPN 12 Bandung, Institut Teknologi Bandung (*Technische Hooge School*) yang didirikan tahun 1920. Pada dekade 1920-an di Kota Bandung terdaftar lembaga pendidikan berjumlah kurang lebih 200.

Bangunan kesehatan terletak di Jalan Pasteur No. 38 (R.S. Hasan Sadikin), fungsi sekarang dan dulu masih sama sebagai rumah sakit umum Bandung (*Algemeene Bandoengsche Ziekenhuis*). Pergantian nama sempat terjadi seperti *Gemeentelijk Juliana Ziekenhuis* dan *Ryukugun Byoin*. Rumah Sakit Advent berada di timur permukiman rumah sakit ini pun tergolong besar dan berada di antara Jalan Cipaganti-Cihampelas.



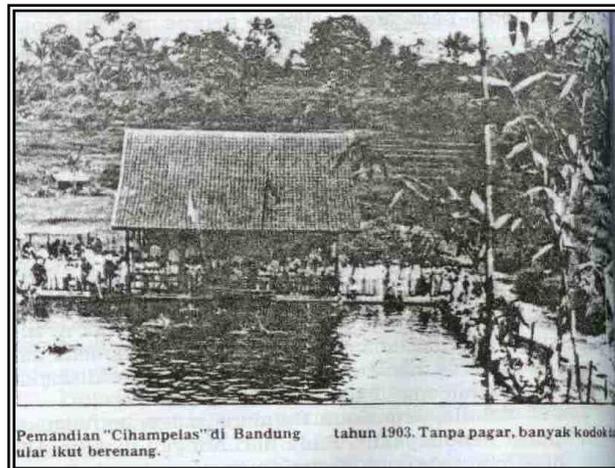
Gambar 6. Kampus ITB Bandung difoto dari arah utara

Sumber: www.bandungheritage.org



Gambar 7. Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin merupakan rumah sakit umum milik pemerintah tertua di Bandung yang didirikan pada tahun 1919, difoto dari arah tenggara

Sumber: Dokumentasi Pribadi



Gambar 8. Tampak Kolam Renang Cihampelas tahun 1902 yang sedang dipadati para pengunjung

Sumber : Haryonto Kunto

Bangunan Hunian Kolonial Belanda di Kawasan Permukiman Cipaganti

Ketika Kota Bandung menjadi *gemeente*, beberapa arsitek Belanda berdatangan untuk berkarya membangun gedung-gedung publik, kantor, hotel, vila, rumah ibadah, dan rumah tinggal. Bangunan niaga belanggam arsitektur *Art Deco* merupakan tema yang paling banyak diterapkan, tema-tema lainnya seperti *Neo Classic*, *Romantic*, *Indische Empire Stijl*, *Indo-Europeesche Architectuur Stijl*, *Oud Holland*, dan *Villa Huis* juga marak menghiasai bangunan di Kota Bandung.

Pada tahun 1923, seorang Arsitek profesional Belanda Hendrik Petrus Berlag berkunjung ke beberapa kota-kota di Hindia Belanda termasuk Bandung. Setelah mengamati langgam arsitektur di kota-kota besar lainnya di Nusantara, ia mengkritik gaya arsitektur Bandung banyak menjiplak bangunan-bangunan di Eropa. Kritikan ini

ditanggapi serius oleh dua orang arsitek yaitu C.P. Wolff Schoemaker dan Maclaine Point, sehingga antara tahun 1920-1940-an justru banyak terlahir karya arsitektural yang menggabungkan dua budaya Timur dan Barat.

Karya inovasi dalam seni bangunan modern Eropa dan tradisional Indonesia tentunya harus meleburkan dua karakter yang berbeda yaitu iklim tropis di Indonesia dan iklim subtropis di Belanda. Identitas arsitektur ini terlihat lebih jelas dan dapat dikatakan sebagai langgam Arsitektur Indis (Hibrid). Arsitektur Hibrid menghasilkan karakter kuat yaitu ditandai dengan adanya proses akulturasi budaya Barat dan Timur di Bandung. Penyebab lainnya adanya proses rekayasa sempurna antara bangunan Eropa yang anggun dipadukan dengan kondisi lokal. Tokoh-tokoh yang banyak mempelopori *Indo-Europeesche Architectuur Stijl*, yaitu: Ed Cuypers, H. Maclaine Point, P.A.J Moojen, dan C.P.Wolff Schoemaker.

Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Kota Bandung dikenal sebagai kota permukiman Belanda (*Een Westerns Enclave*).²⁷ Konsekwensi logis dari akulturasi antara kehidupan bangsa Eropa dengan pribumi beimplikasi pada kondisi sosial-budaya, politik, ekonomi, dan edukasi di masyarakat di Kota Bandung.

Kedatangan orang-orang Eropa di Bandung memberi pengaruh pada gaya hidup warga pribumi, terutama dalam bidang budaya yang mengarah pada modernisasi, industrialisasi, dan komersialisasi. Hubungan-hubungan antar penduduk secara sosial bersifat impersonal. Kondisi seperti ini juga terjadi di beberapa kota besar di Nusantara, seperti Kota Jakarta (Batavia), Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Makasar, dan kota-kota lainnya.²⁸

Gambaran kontras kehidupan masyarakat pribumi dan Eropa di kawasan Cipaganti terlihat sangat signifikan. Orang-orang Belanda dan sebagian kecil para elit pribumi banyak bermukim di wilayah Cipaganti. Permukiman ini jelas lebih teratur, nyaman, berlahan luas, dan memiliki kualitas lingkungan yang jauh lebih baik. Berbeda dengan kondisi bangunan perumahan pribumi yang pada umumnya dibangun di atas petak-petak tanah relatif kecil serta terbuat dari bilik bambu dan beratap ijuk.

Permukiman pribumi kurang teratur dan kualitas lingkungannya kurang baik. Masyarakat pribumi rentan terkena penyakit bahkan tingkat kematian ibu hamil pada waktu itu sangat tinggi. Peter Boomgaard dan A.J. Gooszen menjelaskan bahwa jumlah

²⁷ Haryoto Kunto, Op. Cit., 1986.

²⁸ Djoko Suryo, "Penduduk dan Perkembangan Kota Yogyakarta 1900-1990". Dalam *Kota Lama, Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan* (Jakarta: Penerbit Ombak, 2003). Hal: 42.

angka kematian penduduk di Kota Bandung pada tahun 1911-1912 relatif tinggi.²⁹ Pada tahun 1938 jumlah kelahiran di Kota Bandung rata-rata mencapai 48 orang dari 1000 penduduk. Jumlah kematian di Kota Bandung lebih sedikit dibandingkan dengan kelahiran. Angka kematian tertinggi terjadi pada tahun 1935 dan terendah tahun 1930. Jumlah kelahiran di Kota Bandung setiap tahunnya mengalami peningkatan yang relatif konstan, dengan jumlah kelahiran tertinggi pada tahun 1940 dan terendah pada tahun 1930.

Tabel 1. Jumlah Angka Kelahiran dan Kematian Penduduk di Residen Priangan Tahun 1930-1940.

No.	Tahun	Jumlah Angka Kelahiran	Jumlah Angka Kematian
1.	1930	-	60.678
2.	1931	-	60.934
3.	1932	102.320	68.069
4.	1933	102.179	83.128
5.	1934	101.438	96.877
6.	1935	104.543	92.402
7.	1936	106.004	82.645
8.	1937	117.814	84.214
9.	1938	124.229	79.935
10.	1939	126.257	79.317
11.	1940	127.528	81.439

Sumber: Peter Boomgaard dan A.J. Gooszen 1991, 164, 179).

Kondisi yang memprihatinkan di permukiman penduduk pribumi "mengetuk" hati Bupati Bandung R.A.A. Martanegara (1893-1918) untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat pribumi. Bukti kongkret perhatian Bupati Martanegara yaitu dengan melakukan beberapa program pembangunan desa, di antaranya:

- a. mengganti jenis atap ijuk/ilalang dengan genteng,
- b. mengganti dinding bilik rumah dengan dinding bahan batu bata,
- c. pengerasan jalan, dan
- d. pembangunan beberapa jembatan permanen dengan struktur penguat berbahan besi dan batu.

²⁹ Peter Boomgaard, A.J. Gooszen, *Changing Economy in Indonesia: A Selection of Statistical Source Material from the Early 19th Century up to 1940. Vol. 11. Population Trends 1795-1942* (Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1991).

Penataan perumahan pribumi ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah tentang Pengembangan dan Pengawasan Bangunan dan Perumahan (*Stadsontwikkeling en Bouw-en Woningtoezicht*), yang menekankan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, bebas dari sarang tikus (penyakit pes), dan mendapat ijin dari Penilik Bangunan.³⁰

Lokasi permukiman pribumi berada di belakang Permukiman Kolonial Belanda. Menurut pemaparan Bapak Muhammad (2007), para pribumi itu bermukim di daerah Kampung Gandok, Balubur, Kuaman, Gang Plesir, Cimbuleuit, Dago, Gegerkalong Girang, dan di sekitar Cihampelas. Komunitas atau golongan tertentu biasanya menamakan daerahnya sesuai nama daerah asalnya, seperti Kampung Jawa (dihuni oleh orang-orang dari Jawa), Babakan Surabaya (dihuni oleh orang-orang dari Surabaya), begitu pula Babakan Tarogong, Babakan Ciamis, dan Babakan Bogor.

Kehidupan komunitas bangsa Eropa di Bandung diibaratkan sebagai “benalu” yang senantiasa menghisap kekayaan dari para pribumi. Pada umumnya, kehidupan masyarakat eksklusif Eropa di Bandung Utara tetap mempertahankan pola hidup seperti di Eropa baik menyangkut gaya hidup, menu dan jenis makanan, cara berpakaian, dan lain-lain. Gaya hidup borjuis diperlihatkan para juragan perkebunan (*The Preanger Planters*) dengan mengenakan jenis busana Eropa bergaya bangsawan sambil mengendarai kendaraan mewah. Kondisi lainnya ditandai dengan beragam perkumpulan sosial atau klub, restoran, dan pertokoan yang menjual produk-produk dari Eropa. Warga Eropa yang *fashionable* ini mengekspresikan karakter dirinya di sebuah kawasan Jalan Braga, sehingga Jalan ini dikenal sebagai *De Meest Europeesch Winkel Straat van Indie*.³¹

Orang-orang Eropa yang tinggal di Cipaganti bekerja sebagai tuan tanah di perkebunan, pegawai pemerintah, dan para pengusaha. Ternyata ada pula pribumi yang tinggal di kawasan permukiman elit Cipaganti, jumlahnya sedikit. Pribumi yang bermukim ini adalah seorang juragan keturunan penguasa pribumi. Juragan Sastra namanya, ia memiliki *delman* yang cukup banyak. Saat ini dapat dicermati di sekitar Cipaganti terdapat nama Jalan Sastra. Jalan ini dinamai Sastra karena jasa Juragan Sastra yang memiliki sikap bijak, dihormati banyak orang, rendah hati, dan senang menolong para pribumi.

Dalam bidang pendidikan tidak semua penduduk pribumi dapat menikmati sekolah. Sekolah diperuntukkan bagi orang-orang Eropa dan para keturunan bangsawan atau para pengusaha pribumi. Sekolah-sekolah tersebut, diantaranya Taman Kanak-kanak (*Froebel School*) di Jl. Merdeka, Sekolah Dasar (*Lagere School*) Jl. Merdeka 5 dan Banjarsari, Sekolah Pertukangan (*Ambachtscholen*), Sekolah Guru

³⁰ Haryoto Kunto, Op. Cit., 1985. Hal. 74.

³¹ Eva Rufidah, Tesis: “Perkembangan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Perkotaan Bandung 1906-1930” (Yogyakarta: UGM, 2003), Hal. 62-65.

Denny Santika

(*Kweek School* 1866), Sekolah Pangreh Praja atau Sekolah Menak (OSVIA) di Tegallega, ITB (*Technische Hooge School*), dan Perpustakaan Umum di depan Societeit Concordia.³² Dari aspek religi, sebagian bangsa Eropa di Bandung beragama Nasrani (Katolik dan Protestan). Oleh karenanya, bangunan gereja senantiasa berada di sekitar Permukiman Kolonial Belanda. Keberadaan masjid di Bandung pada saat pemerintahan Kolonial Belanda jumlahnya relatif sedikit. Masjid Agung Bandung merupakan satu-satunya masjid *jami* di Kota Bandung sebagai pusat aktivitas ibadah umat Islam. Pada tahun 1993 dibangunlah Masjid Agung Cipaganti di Bandung Utara. Masjid Agung Cipaganti dibangun untuk memfasilitasi kegiatan peribadatan masyarakat Islam yang berada di bagian Kota Bandung Utara dan menjadi alternatif sarana peribadatan ke-2 selain Masjid Agung Bandung.

Sejarah Pembangunan Masjid Agung Cipaganti

Masjid Agung Cipaganti beralamat di Jalan Cipaganti No. 85 dan terletak di lahan "tusuk sate" antara Jalan Cipaganti (sekarang Jl. Rd. AA Wiranata Kusumah) dengan Jalan Sastra. Masjid ini berada di lingkungan *Een Westerns Enclave* (permukiman bangsa Eropa).

Masjid Agung Cipaganti dibangun dengan perpaduan arsitektur Eropa dan Jawa Barat yang tidak meninggalkan prinsip-prinsip tradisional karena ditunjang oleh latar belakang pengetahuan arsitek yang luas dan mendalam terhadap arsitektur dan budaya Jawa. Tahap awal pembangunan masjid, dimulai pada tanggal 7 Pebruari 1933 dengan acara seremonial, yaitu peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Bupati Bandung Asta Kandjeng Raden TG. Hassan Soemadipradja, yang didampingi oleh Patih Bandung Rd. Wirijadinata, dan sebagai saksi *Hoofd* Penghulu Rd. H. Abdul Kadir.

Data informasi tersebut terekam dalam prasasti masjid yang terletak di bagian utara atau sisi kanan tembok masjid. Prasasti ini memuat informasi lengkap tentang waktu pendirian, tokoh pendiri, dan termasuk arsiteknya. Bahasa yang digunakan dalam prasasti ini menggunakan bahasa sunda, dengan isi sebagai berikut:

"Pangemoet-ngemoet ngadegna Masjid Tjipaganti 11 Syawal 1351 (7 Pebruari 1933) diistrenan dina Ping 11 Syawal 1352 (27 Januari 1934). Batoe ka hidji dipasang koe Asta Kandjeng Boepati Bandoeng Raden TG. Hassan Soemadipradja disarengan koe Raden R.G. Wirijadinata Patih Bandoeng, Raden Hadji Abdoel Kadir Hoofd Panghoeloe Bandoeng". Isi prasasti kedua, *"Architect Prof. Wolff Schoemaker anoe ngadegkeun anggabrata dibantoe koe keramisch laboratorium 1933"*.

³² Djefry W. Dana, Op. Cit., Hal. 16.



Gambar 9. Prasasti pendirian Masjid Agung Cipaganti

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Pada tahun 1979-1988, Masjid Agung Cipaganti mengalami proses renovasi besar-besaran, yaitu dengan memperbaiki interior dan memperluas *tepas* (serambi) utara dan selatan, masing-masing berukuran 17 m². Dengan proses renovasi itu, luas ruangan utama Masjid Agung Cipaganti menjadi 43 m x 15 m. Peristiwa perubahan penamaan masjid juga dilakukan pada saat masjid sedang direnovasi. Sebelum bernama Masjid Agung Cipaganti, masjid ini bernama Kaum Cipaganti. Nama Masjid Kaum Cipaganti dipakai hingga tahun 1979, pada tahun selanjutnya penamaan masjid dirubah menjadi Masjid Agung Cipaganti dan kemudian terakhir bernama Masjid Agung Cipaganti.

Dalam kondisi sekarang ini, Masjid Agung Cipaganti menjadi tempat persinggahan bagi para wisatawan yang datang ke Bandung. Hal ini dikarenakan keletakan masjid yang strategis, yaitu di pinggir jalan protokol (Jalan Cipaganti) jalur utama menuju ke Lembang dan Kota Subang.

Alasan Keletakan Masjid Agung Cipaganti di Permukiman Kolonial Belanda

Masjid Agung Cipaganti berada di Jalan Cipaganti No. 85 Kel. Pasteur Kec. Sukajadi Kota Bandung. Masjid ini berdiri di atas tanah wakaf yang tercatat dalam Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung No.10.15.07.01.1.01.99, Hak Milik No. 1099/Wakaf dengan Nomor Persil: 136.D.1/Nomor Kohir: 587. Luas tanah keseluruhan 2675 m² dengan rincian batas tanah yang sesuai dengan surat pernyataan dari salinan daftar penetapan walikota praja Bandung, No.3/Wak/1958 Tanggal 6 Juni 1958, di sebelah utara berbatasan dengan Tanah Kota Praja, timur dengan Jl. Cipaganti, selatan dengan Tanah Kota Praja, dan sebelah barat berbatasan dengan

Tanah Eigendom Tan Gin Tjong dan tanah Milik Njih. R.H. St. Marijam.³³ Keletakan bangunan Masjid Agung Cipaganti tepatnya berada di wilayah *Onderdistrict* Cipaganti, *District* Lembang, dan *Regenschap* Priangan Tengah.

Bangunan Masjid Agung Cipaganti dengan pepohonan damar di depannya tampak indah jika dilihat dari sudut pandang Jalan Sastra. Pohon damar berdiameter besar tersebut ditanam pada tahun 1938, berjajar di sepanjang Jalan Cipaganti membuat suasana lebih asri, nyaman, dan teduh. Penanaman pepohonan di sepanjang jalan itu merupakan program harmonisasi lingkungan kota dengan alam yang direncanakan secara cermat oleh komite perlindungan alam Bandung (*Committe tot Natuurbescherming* yang berdiri tahun 1917).³⁴

Di sekitar Masjid Agung Cipaganti terdapat lokasi permukiman yang bernama Kaum. Lokasi ini berada di belakang masjid, beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi ini mayoritas beragama Islam. Jamaah Masjid Agung Cipaganti sebagian besar berasal dari daerah Kaum. Sebagian lagi berasal dari permukiman pribumi di Gang Plesir, Cimbuleuit, tepatnya daerah Gandok, dan daerah Cihampelas. Pada perkembangannya banyak jamaah yang berasal dari luar.

Lokasi Masjid yang terletak di jalan utama Bandung menuju Lembang, Subang, dan wilayah-wilayah perkotaan Jawa Barat bagian utara menempatkan masjid ini berada di lokasi menguntungkan. Jalan utama ini dahulu bernama *Nyland weg*, kemudian berganti menjadi *Tjipaganti weg* dan sekarang menjadi Jalan W.R.A. Wiranata Kusumah. Masjid Agung Cipaganti dapat pula ditempuh dari Jalan Cipaganti dengan melewati Jalan Sastra, sehingga dapat langsung berada di depan masjid.

Pada dekade ke-3 abad ke-20, tepatnya tanggal 7 Pebruari 1933 dibangun Masjid Agung Cipaganti. Masjid Agung Cipaganti diperuntukan sebagai tempat peribadatan penduduk pribumi muslim di Bandung Utara. Masjid ini didirikan sebagai tempat memenuhi kebutuhan penduduk pribumi yang keberadaannya jauh dari masjid Agung Bandung.³⁵

Masjid Agung Cipaganti sejak awal penamaan telah berganti dari Masjid Kaum Cipaganti kemudian berubah menjadi Masjid Agung Cipaganti. Dalam prasasti bangunan ini diperoleh keterangan yang menyebutkan masjid. Masjid Agung Cipaganti adalah masjid *jami* tingkat permukiman di *Onderdistrict* Cipaganti, *District* Lembang yang dibangun dengan konsep lebih modern dan tidak mengikuti pola baku keruangan kota Islam. Masjid Agung Cipagati terletak di sebelah barat Jalan Cipaganti dengan bentuk persegi panjang dan berposisi vertikal utara-selatan (membujur). Kelengkapan komponen masjid ini berbeda dengan masjid-masjid tradisional

³³ Tim Penyusun, "Membangun Manusia Bermartabat". Dalam *Profil Masjid Raya Cipaganti Kota Bandung Propinsi Jawa Barat* (Bandung: Sekertaris Masjid Raya Cipaganti, 2004).

³⁴ Eva Rufidah, Op. Cit., Hal. 62-65.

³⁵ Ibid., Hal. 109.

sebelumnya. Masjid Agung Cipaganti tidak memiliki menara, tidak bermaksurah, tidak memiliki pawastren dan tidak memiliki kolam air di sekeliling masjid. Namun yang menarik dari Masjid ini, penerapan tembok *kelir* yang merupakan komponen dari arsitektur masjid tradisional.

Bangunan tempat ibadah atau ritual keagamaan senantiasa menjadi kebutuhan mendasar di suatu komunitas permukiman. Religi merupakan bagian dari tujuh unsur pokok kebudayaan yang senantiasa hadir dalam kehidupan manusia. Pada setiap periode, mulai dari masa Prasejarah, Klasik, Islam, hingga Kolonial, bangunan peribadatan termasuk tinggalan arkeologis yang ditemukan dan teridentifikasi dengan baik. Bangunan tersebut memiliki dua sifat, yaitu bersifat *death monument* dan *living monument*. *Death monument* maksudnya bahwa bangunan arkeologis yang secara fungsional sudah tidak digunakan kembali tetapi masih dapat dimanfaatkan dan dilestarikan sebagai Benda Cagar Budaya. Bangunan bersifat *living monument* adalah bangunan arkeologis yang secara fungsional masih digunakan dan dimanfaatkan seperti semula. Di antara tinggalan arkeologis yang bersifat *living monument* yang masih digunakan dan berkembang sampai dengan sekarang di antaranya: hunian, gereja, masjid, dan pemakaman.³⁶

Keberadaan sebuah situs bangunan keagamaan berupa masjid sampai saat ini masih tetap terpelihara dengan baik, dikarenakan adanya pemeliharaan dan penggunaan yang terus berlangsung secara intensif. Keterkaitan antara sebuah materi dan manusia pendukungnya dapat membentuk tatanan sosial yang utuh. Oleh karena itu, setiap elemen pembentuk budaya materi tidak terlepas dari gambaran kehidupan sosial masyarakatnya. Hubungan seperti itu bersifat sistemik dan terbentuk berdasarkan keterikatan antar subsistem.

Fenomena keletakan Masjid Agung Cipaganti di Permukiman Kolonial Belanda yang berdasarkan tinjauan aspek keruangan, maka ruang lingkungannya meliputi persebaran lokasi bangunan-bangunan dan interaksinya. Interaksi antar bangunan dalam satu kawasan permukiman mencakup sistem teknologi, sistem sosial-budaya, politik, sistem ekonomi, institusi-institusi yang berada di dalamnya, dan keagamaan dalam tatanan komunitas masyarakat yang tinggal di permukiman tersebut. Keberadaan Masjid Agung Cipaganti termasuk dalam hasil interaksi budaya yang dipengaruhi oleh seluruh sistem tatanan sosial masyarakat di sebuah permukiman. Di dalam kompleks permukiman itu terjalin suatu komunitas masyarakat yang memiliki budaya homogen.

Keletakan bangunan Masjid Agung Cipaganti dalam permukiman tidak terjadi secara spontan dan tanpa perencanaan konsep dasar yang utuh. Dengan demikian, keletakan sebuah bangunan dalam tata ruang permukiman dibangun dan dirancang sedemikian rupa dengan tujuan menciptakan pola tata keruangan yang memenuhi

³⁶ Tim Penyusun, *Masjid Kuno Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999). Hal. 1.
125

kebutuhan dasar para pemukim. Pola tata ruang terencana inilah yang menjadi kunci untuk menjawab fenomena keletakan setiap bangunan. Pada dasarnya manusia menurut Maslow memiliki kebutuhan pokok yang berkaitan dengan kebutuhan fisiologis (seperti makan, minum, istirahat), rasa aman, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Prinsip ini melekat pada berbagai komponen pokok dalam sebuah permukiman, yaitu: tempat tinggal, keamanan, ekonomi, religi, dan rekreasi. Kesemuanya tidak berdiri sendiri akan tetapi membentuk sistem yang berjalan secara bersamaan.

Penempatan bentuk elemen-elemen fisik di permukiman memang dirancang memenuhi aspek kesesuaian visual. Para Arsitek Belanda dalam membuat karya bangunan senantiasa mempertimbangkan segi lingkungan alam maupun latar belakang budayanya, sehingga didapat suatu citra positif yang terekam dan bermakna dalam benak seseorang. Interaksi antara bangunan dengan penikmatnya akan menghidupkan komunikasi (kedekatan emosional) dengan sesosok bangunan materi.³⁷

Permukiman sebagai sistem kompleks yang di dalamnya terdapat tatanan sosial yang rumit. Permukiman Kolonial Belanda di Cipaganti adalah suatu permukiman yang di dalamnya didominasi oleh budaya Eropa. Hal ini dikarenakan para pemukim yang tinggal di sana adalah para elit bangsa Eropa, terutama Belanda. Kehidupan masyarakat pribumi dan Eropa menyatu dengan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan diantisipasi. Interaksi antara kedua kebudayaan yang berbeda tersebut menyebabkan proses akulturasi. Proses ini terjadi dengan tahapan, yakni: penerimaan (*acceptance*), penyesuaian (*adaptation*), dan reaksi (*reaction*). Pengaruh dalam interaksi tersebut akan menghasilkan sebuah komplikasi gabungan dua budaya yang berbeda dari semula.

Walaupun komunitas di Permukiman Kolonial Belanda beragama bukan Islam, Masjid Agung Cipaganti adalah wujud identitas umat muslim pribumi di wilayah Cipaganti. Budaya materi yang terkandung di dalam masjid merupakan cerminan masyarakat pendukung budaya tersebut. Idealnya sebuah masjid dapat mewarnai kehidupan masyarakat di sekitar lingkungan masjid. Oleh karena itu, interaksi antara bangunan masjid dengan penggunaanya saling terikat dan bersifat mutlak. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Masjid Agung Cipaganti berlanggam arsitektur campuran atau *hibrid*. Budaya lokal Jawa Barat masih melekat dan terlihat pada setiap komponen bangunan yang dipadukan dengan arsitektur modern.

Alasan penempatan Masjid Agung Cipaganti di Permukiman Kolonial Belanda di Bandung Utara, setidaknya telah mempertimbangkan beberapa aspek penting. Secara tofografis wilayah Kota Bandung menempati daerah landai dengan kondisi iklim (curah hujan tinggi di setiap tahunnya). Hal ini menyebabkan wilayah Kota Bandung rentan terkena banjir. Wilayah Kota Bandung sudah dikenal sejak akhir abad

³⁷ Djefry W. Dana, Op. Cit., Hal. 36.

ke-19 sebagai kota yang sering terkena banjir. Banjir besar pertama di Kota Bandung terjadi di akhir abad ke-19, banjir besar kedua terjadi pada tahun 1917, dan banjir besar ketiga terjadi pada tahun 1931. Sampai tahun 1980-an, Kota Bandung senantiasa terkena banjir jika cuaca hujan.³⁸

Kota Bandung pada abad ke-20 wilayahnya merupakan daerah rawa-rawa. Bupati Martanegara menggagas untuk menimbun (*saeur*) daerah rawa-rawa tersebut untuk dijadikan wilayah perluasan kota. Hal ini berbeda dibandingkan dengan daerah Utara yang wilayahnya masih berupa hutan-hutan yang ditumbuhi pohon-pohon pelindung, berbukit-bukit, serta memiliki sumber mata air yang melimpah. Di daerah Bandung Utara terdapat Situ Bunjali dan Empang Cipaganti.³⁹

Dalam catatan Dr. Groneman⁴⁰ mengungkapkan beberapa alasan mengapa Kota Bandung perlu memelihara dan melestarikan daerah konservasi resapan air. Alasan ini disebabkan:

- a) Wilayah Kota Bandung merupakan sisa sebuah danau (Telaga Bandung) yang telah mengering. Di akhir abad ke-19, Dataran Tinggi Bandung kondisi tanahnya masih berawa-rawa. Lahan kosong di sekitar Kota Bandung berada di bawah ketinggian 725 m dari permukaan laut (batas tepi Telaga Bandung) dan dalam keadaan gundul. Secara umum keadaan lingkungan alam Kota Bandung digambarkan dalam keadaan tidak lestari karena jarang tumbuhan yang dapat meresap air.
- b) Banjir kerap terjadi di Bandung meskipun curah hujan dalam skala kecil dikarenakan kondisi lahannya gundul dan jarang pepohonan, apalagi daerah Bandung Selatan yang berawa-rawa dan senantiasa menjadi muara limpahan air hujan. Alasan lainnya disebabkan pegalihfungsian lahan hijau di beberapa wilayah resapan air untuk dijadikan lahan pertanian oleh para penduduk. Daerah yang terus-menerus tergenang air sangat rentan terkena penyakit, terutama wabah malaria. Luas genangan air akibat banjir rutin ini rata-rata mencapai 1.700 ha. Sebagai fakta bahwa banjir tahun 1931 telah merendam wilayah Bandung kurang lebih seluas 6000 ha.

Kota Bandung bagian Utara menjadi alternatif pilihan dalam pengembangan tata kota. Pemerintah *gemeente* merelokasikan bangunan perkantoran dan permukiman semula di pusat kota menuju utara kota. Pembukaan jalan baru menuju utara menembus areal pesawahan dan perkebunan. Jl. Cihampelas, Jl. Dago, dan Jalan Cipaganti adalah jalan utama yang menghubungkan pusat Kota Bandung menuju wilayah Utara (Lembang dan Subang).

Permukiman Kolonial Belanda ditempatkan linear di sepanjang Jalan Cipaganti dan penduduk pribumi berada di sekitarnya. Bandung Utara pada saat itu merupakan

³⁸ Kunto Haryoto, Op. Cit., 1986. Hal. 108.

³⁹ Eva Rufidah, Op. Cit., Hal. 44.

⁴⁰ Kunto Haryoto, Op. Cit., 1986. Hal. 188.

tempat bermukimnya penduduk asli Bandung. Beberapa kampung tua terkonsentrasi di wilayah Utara ini, seperti Kampung Gandok, Balubur, Kuaman, Gang Plesir, Cimbuleuit, Dago, Gegerkalong Girang, dan di sekitar Cihampelas. Pola permukiman penduduk cenderung konsentris dan beberapa linear mengikuti alur sungai Cikapundung dan Sungai Cilimus.

Pemerintahan Kolonial Belanda membangun berbagai sarana-prasarana untuk mencapai kesejahteraan bagi para pemukim Eropa di Bandung Utara. Pembuatan taman di sekitar permukiman, sarana bermain, drainase dan sanitasi air yang baik, sarana pemerintahan, kesehatan, pendidikan, hiburan, ekonomi, dan sarana olah raga menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh bangsa Eropa di permukiman tersebut. Oleh karena itu, Permukiman Kolonial Belanda memiliki pola tata ruang dan tata guna tanah yang lengkap dengan tujuan membentuk permukiman fungsional, efektif, dan efisien.⁴¹

Selain aspek lingkungan, tinjauan berdasarkan efisiensi dan efektivitas keruangan kiranya dapat menambah interpretasi keletakan Masjid Agung Cipaganti di Permukiman Kolonial Belanda. Keletakan Masjid berada di pinggir Jl. Cipaganti, terpusat menaungi lokasi permukiman penduduk pribumi yang menyebar di sekitar Permukiman Kolonial Belanda. Masjid Agung Cipaganti memiliki letak yang strategis sehingga mudah diakses oleh para jamaah yang akan beribadah terutama para pekerja di industri farmasi dan perusahaan-perusahaan industri. Permukiman penduduk pribumi yang berada di belakang permukiman bangsa Eropa dapat dengan mudah mengakses masjid. Bersumber pada data toponim wilayah permukiman penduduk pribumi di sekitar Masjid Agung Cipaganti, terdapat permukiman yang dinamakan Kampung Kauman atau Kaum. Di permukiman ini sebagian besar dihuni oleh masyarakat pribumi beragama Islam. Masyarakat Islam tersebut yakni masyarakat yang diwarnai dengan latar belakang agama atau kebudayaan Islam. Keberadaan Masjid Agung Cipaganti di permukiman tersebut adalah sebagai sarana aktualisasi jiwa (rohani) dan dinamisasi kehidupan di tengah budaya masyarakat Eropa.

Keberadaan permukiman-permukiman di suatu wilayah senantiasa membentuk suatu hierarki pusat pengawasan yang dikenal dengan *central place*. Dalam teori ini efisiensi dan efektifitas biaya finansial merupakan kriteria paling dasar dalam organisasi keruangan dari aktivitas manusia. Teori ini mengungkapkan bahwa permukiman akan mengambil tempat pada suatu lahan, yang tergantung dari ketersediaan sumber-sumber dan jalur komunikasi. Sarana transportasi dan telekomunikasi, sarana pendidikan, pusat kegiatan ekonomi, sarana rekreasi, dan instansi-instansi publik terpola menjadi zona-zona yang mengikuti kebijakan rancangan pemerintah mengenai rancangan tata ruang kota.

⁴¹ C. Djemabut Blaang (ed.), *Perumahan dan Permukiman Sebagai Kebutuhan Pokok* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986). Hal. 7.

Wilayah Permukiman Kolonial Belanda di Cipaganti menuju utara mendukung pada akses perkebunan dan di bagian selatan sebagai daerah perkantoran dan pusat kota. Bandung Utara sebagai lahan perkebunan dan penambah pendapatan produktif Pemerintahan Kolonial Belanda, sehingga para pengelola perkebunan akan lebih efisien dan efektif jika bermukim di Cipaganti. Sarana prasarana pendukung di kompleks permukiman Kolonial itu, secara umum terklasifikasi menjadi zona perkantoran dan perindustrian yang terletak di bagian timur dan selatan dan di bagian utara terdapat Gereja dan Kantor Pos, dan zona permukiman pribumi, zona perekonomian rakyat, dan zona keamanan berada di bagian barat.

Bupati Bandung bereperan dalam menyediakan fasilitas peribadatan untuk pribumi. Dalam prasasti di sebelah utara dinding gerbang masuk Masjid Agung Cipaganti menginformasikan pendiri masjid, yaitu Bupati Bandung Asta Kandjeng Raden TG. Hassan Soemadipradja yang didampingi oleh Patih Bandung Rd. Wirijadinata serta disaksikan oleh Penghulu Rd. H. Abdul Kadir. Prakarsa Bupati Bandung ini adalah suatu legitimasi bahwa pembangunan masjid diperuntukan untuk pribumi dan diawasi atau disetujui oleh Patih (sebagai "tangan kanan" Belanda), sekaligus saksi dari pihak masyarakat pribumi yaitu seorang penghulu.

Masjid Agung Cipaganti dirancang oleh seorang berkebangsaan Belanda, yang bernama Prof. Ir. C.P. Wolff Schomaker. Walaupun demikian, terdapat alasan mengapa arsitek yang merancang masjid tersebut berkebangsaan Belanda. Wawancara dengan Bapak Udju sebagai pengurus Masjid Agung Cipaganti generasi ke-2, menginformasikan bahwa tambahan nama Kemal pada C.P. Wolff Schoemaker diperkirakan sebagai tambahan pasca berikrar untuk beragama Islam. Nama Kemal identik nama dengan khas Timur Tengah yang rata-rata menganut Islam. Masih menurut penuturan Bapak Udju bahwa C.P. Wolff Schomaker ketika membangun masjid telah beragama Islam. Akan Tetapi, pada akhir hayatnya C.P. Wolff Schomaker beragama Nasrani, yang dimakamkan di pemakaman Pandu.

Faktor lainnya yang menjadi alasan penempatan Masjid Agung Cipaganti dipengaruhi perkembangan politik Pemerintahan Kolonial Belanda itu sendiri. Pemerintah Kolonial Belanda yang eksistensi kekuasaannya semakin kuat, memerlukan simpati masyarakat pribumi agar kedudukan dan hubungan dengan masyarakat pribumi tetap berlangsung baik. Politik yang digunakan untuk meredam pemberontakan pribumi (*Inlandsch Polotiek*) dikenal dengan politik etis (*ethiche politik*). Politik ini diterapkan pada awal abad ke-20, yang diprakarsai oleh Mt. Tn. Van Deventer.

Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda menjadikan Bandung sebagai *gemeente* di tahun 1906, sebenarnya sebagai landasan kuat pemberlakuan penerapan kebijakan politik etis. Faktor inilah yang menjadikan politik dan ekonomi Kota Bandung

semakin kuat dan berperan dalam menentukan kekuasaan Hindia Belanda di Nusantara.⁴²

Tekanan imperialisme, liberalisme, dan kolonialisme pemerintah Hindia Belanda yang demikian kuat, sehingga membuat rakyat pribumi tertindas, menderita, dan mengalami keterbelakangan mental. Banyak dampak buruk yang harus ditanggung oleh negeri jajahan, seperti kebodohan, kemiskinan, pengangguran dan buruknya kesehatan. Oleh karena itu, salah seorang berkebangsaan Belanda bernama Mr. Th. van Deventer "terketuk" hatinya dan berinisiatif untuk menghapuskan ketidakadilan yang diderita masyarakat pribumi selama itu. Mr. Th. van Deventer menyatakan bahwa sebenarnya kemakmuran Negeri Belanda tidak lain adalah hasil dari kekayaan alam Nusantara yang telah dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan negerinya. Politik etis dikemukakan secara informal pada tahun 1899, yang dipakai sebagai upaya mensejahterakan dan memakmurkan daerah jajahan (*welvaartspolitik*).⁴³

Pada tahun 1901, Ratu Belanda Wilhelmina secara formal menetapkan kebijakan politik etis. Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu menyuplai dana 40 juta gulden untuk merealisasikan kebijakan politik ini.⁴⁴ Walaupun pada tataran praktis di lapangan, politik ini digunakan sebagai alat legitimasi untuk memperoleh kedudukan yang lebih kuat. Akibat dari penerapan politik ini, Pemerintah Kolonial dapat dengan mudah dan murah memperoleh tenaga kerja karena sumber daya manusia terampil melimpah dengan upah kerja yang relatif kecil. Kondisi seperti ini justru dimanfaatkan secara utuh untuk kepentingan pendapatan dan modal Pemerintah Kolonial Belanda sendiri, karena pada saat itu Negara Belanda sedang dilanda krisis perekonomian.⁴⁵

Selain menerapkan politik etis, dikenal pula politik asosiasi yang lebih menekankan pada "penjinakan" umat Islam. Pada prinsipnya politik asosiasi ini bertujuan untuk menjembatani kalangan pribumi sebagai *partner* dan pegawai di pemerintahan Kolonial Belanda. Politik ini khusus digunakan untuk meredam perlawanan masyarakat Islam. Peletak dasar kebijakan politik asosiasi ini adalah Snouck Hurgronje. Pola strategi untuk mengatasi umat Islam di Nusantara semakin jelas setelah Snouck Hurgronje berhasil mengatasi perlawanan rakyat Aceh

Snouck Hurgronje (sebagai *Adviseur voor Inlansche Zaken*) membedakan Islam dalam arti "ibadah" dengan Islam sebagai "kekuatan sosial politik". Dalam hal ini Snouck H. membagi masalah Islam atas tiga kategori, yakni:

1. Bidang agama murni atau ibadah.
2. Bidang sosial kemasyarakatan.

⁴² Reiza D. Dienaputra, Op. Cit., Hal. 189.

⁴³ Beta Afriananta, Skripsi: "Perkembangan Tata Kota Gementee Magelang 1906-1942" (Yogyakarta: UGM, 2006).

⁴⁴ H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1996). Hal. 100.

⁴⁵ Beta Afriananta, Loc. Cit.

3. Bidang politik.⁴⁶

Ketiga hal tersebut dikenal dengan landasan pokok pemerintah Kolonial Belanda dalam menangani masalah Islam di Nusantara. Dalam bidang agama murni dan ibadah, pemerintah kolonial memberikan kebebasan yang seluas-luasnya, sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda. Dalam bidang kemasyarakatan pemerintah kolonial memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku dengan cara menggalakkan rakyat untuk mendekati Belanda. Akan tetapi, dalam bidang ketatanegaraan pemerintah Kolonial Belanda harus mencegah setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan Pan Islam. Politik pemisahan ini dikenal dengan *splitsingstheorie*.

Hubungan pemerintahan Kolonial Belanda dengan agama tidak dapat dilepaskan dari hubungan antar sesama umat beragama, yakni umai Islam dan Kristen (Protestan dan Katolik). Netralitas terhadap keduanya akan tampak pada kondisi nyata di masyarakat, sebagai ilustrasi di Permukiman Kolonial Belanda Cipaganti terdapat dua bangunan keagamaan masjid dan gereja. Kebijakan bersikap netral terhadap agama sebagai upaya meningkatkan kerukunan dan keamanan. Walaupun pada akhirnya terdapat keterlibatan pemerintah Kolonial Belanda dalam mengurus masalah agama, terutama agama Islam.

Politik asosiasi pada akhirnya digunakan sebagai upaya untuk memperkuat kedudukan Pemerintah Kolonial Belanda dan menyingkirkan dominasi Islam. Ajaran Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal saja, tetapi hubungan horizontal sesama manusia pun termaktub dalam ajaran ini. Oleh karenanya, pemerintah Belanda menyimpulkan bahwa ajaran Islam sebagai negara dalam negara (*staat in den staat*). Pemerintahan Kolonial Belanda berencana menjadikan masyarakat Islam Nusantara, khususnya di Jawa dan Madura menuju dunia modern akan terwujud jika proses asosiasi kebudayaan (pemanfaatan adat dan sektor pendidikan) berjalan dengan baik.⁴⁷

Dalam setiap kebijakan pemerintah Kolonial Belanda tidak hanya berdampak negatif, di sisi lain tentunya memberikan dampak positif bagi rakyat pribumi Nusantara. Manfaat yang dapat diambil dari kebijakan penerapan politik etis, secara umum masyarakat pribumi berkesempatan untuk mendapatkan hak irigasi, edukasi, dan emigrasi. Secara khusus rincian kebijakan tersebut meliputi hak belajar, hak bekerja di berbagai perusahaan, fasilitas rumah sakit, berperan di instansi pemerintahan, dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana insprastruktur darat.⁴⁸ Manfaat politik etis ini juga dapat meningkatkan investasi modal di Indonesia (dalam bentuk proyek-proyek pembangunan lebih impresif) dan membenahan kualitas pelayanan birokrasi pemerintah Hindia Belanda.

⁴⁶ H. Aqib Suminto, Op. Cit., Hal. 12.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Patricia Petty Paramastri, Loc. Cit.

Pembangunan Masjid Agung Cipaganti di Permukiman Kolonial Belanda merupakan implementasi positif dari penerapan politik asosiasi dan etis. Masjid tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pribumi. Masjid Agung Cipaganti juga dimanfaatkan sebagai penyeimbang kepentingan pemerintah Kolonial Belanda terhadap para pribumi. Penerapan politik asosiasi dan etis ini sedikitnya telah memberikan peluang selebar-lebarnya kepada masyarakat Islam. Pada tahap sebelum penerapan politik ini, pemerintah Kolonial Belanda sangat melarang perkumpulan dalam bentuk diskusi selepas melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Masyarakat pribumi pun dilarang memahami Al Quran, hanya sebatas diperbolehkan membaca saja. Pemerintah Kolonial Belanda merasa khawatir munculnya semangat perjuangan masyarakat yang dipelopori oleh umat Islam, karena diilhami dari sumber ajaran Islam yang benar yaitu Al Quran dan As Sunnah.

Pada akhirnya perjuangan itu tidak mengenal pengekan justru semakin dikekang semakin tampak perjuangan sesungguhnya. Munculnya organisasi-organisasi keislaman dan para tokoh cendekiawan Islam setidaknya telah memberi warna dalam memperjuangkan ketidakadilan, membebaskan keterjajahan, dan menghantarkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia tercinta ini. Masyarakat pribumi Islam semakin menemukan eksistensi jati diri rasa cinta terhadap tanah airnya (nasionalisme). Perkiraan pemerintah Hindia Belanda terhadap kondisi sosial masyarakat Islam ternyata meleset. Politik etis dan asosiasi yang diterapkan kepada pribumi menghasilkan para pejuang berjiwa militan yang tidak gentar mati berjuang untuk bangsanya.

4. Kesimpulan

Pada abad ke-20, kebutuhan permukiman bagi bangsa Eropa menjadi perhatian utama pemerintahan Kolonial Belanda. Salah satu wujudnya adalah pembangunan permukiman di Bandung Utara, termasuk kawasan Cipaganti, yang dipilih karena kondisi topografi dan ekologi yang baik. Tata ruang permukiman ini dirancang secara efisien dan strategis, didukung sarana-prasarana yang memadai. Keberadaan Masjid Agung Cipaganti di kawasan tersebut mencerminkan dinamika sosial dan budaya lokal. Masjid ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat pribumi yang tinggal di sekitar permukiman kolonial, sekaligus melayani para pekerja dari zona industri dan pemerintahan yang berkembang pada 1920-an. Pendirian masjid ini juga tidak lepas dari pengaruh kebijakan politik etis dan asas netralitas agama yang dianut pemerintah Hindia Belanda, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan ajaran agama dengan damai dan rukun.

Masjid Agung Cipaganti menjadi bagian integral dari sistem tata ruang di kawasan Cipaganti yang meliputi bangunan industri, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan keagamaan, seperti RS Hasan Sadikin, PT Bio Farma, Gereja Baptis, hingga SMUN 12 Bandung. Statusnya sebagai masjid jami tingkat permukiman di wilayah

Denny Santika

Onderdistrict Cipaganti, District Lembang, menunjukkan fungsinya sebagai pusat keagamaan yang melayani masyarakat luas, termasuk dari daerah Sukajadi, Hegarmanah, Cihampelas, Gegerkalong, Cimbuleuit, dan Kaum Cipaganti. Peran masjid ini sangat penting dalam membentuk tatanan sosial masyarakat pribumi Bandung Utara pada masa kolonial.

Daftar Pustaka

- Adiwirawan, Endro, "Relasi Spasial Antara Kegiatan Ritual Ibadah Berjamaah Dengan Arsitektur Masjid Di Bandung Studi Kasus: Masjid Cipaganti, Masjid Salman, Dan Masjid Al Irsyad," *Jurnal Idealog: Ide Dan Dialog Desain Indonesia*, 2.1 (2018). <https://doi.org/10.25124/idealog.v2i1.1180>.
- Adrisijanti, Inajati, *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam* (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2000).
- Afrianta, Beta, *Perkembangan Tata Kota Gementee Magelang 1906-1942* (Yogyakarta: Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah FIB UGM, 2006).
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung, *Bandung dalam Angka* (Bandung: Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2005).
- Blaang, C. Djemabut (ed.), *Perumahan dan Permukiman Sebagai Kebutuhan Pokok* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986).
- Boomgaard, Peter, A.J. Gooszen, *Changing Economy in Indonesia: A Selection of Statistical Source Material from the Early 19th Century up to 1940. Vol. 11. Population Trends 1795-1942* (Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1991).
- Dana, Djefry W., *Ciri Perancangan Kota Bandung* (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 1990).
- Reiza D. Dienaputra, "Bandung 1906 - 1970: Studi Tentang Perkembangan Ekonomi Kota", *Artikel* diunduh dari <https://pustaka.unpad.ac.id/archives/86437#>, (diakses pada tanggal 23 Mei 2025).
- Fachrina, Zulva, "Masjid Raya Cipaganti, Heritage Kota Bandung Yang Memadukan Gaya Arsitektur Jawa Dan Eropa," dalam *Seminar Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI)* 1, A393-98, (2017). <https://doi.org/10.32315/sem.1.a393>.
- Iskandar, M. Syaom Barliana, "Tradisionalitas dan Modernitas Tipologi Arsitektur Masjid". *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur*, 32.2 (2004), 110 - 118.
- Izzati, Husna, Andiyan Andiyan, Irfan Aldyanto, "Akulturasi Lintas Budaya Islam, Barat, dan Nusantara di Masjid Cipaganti Bandung", *Jurnal Al-Adabiya Kebudayaan dan Keagamaan*, 16 (2021), 111-124.
- Kunto, Haryoto, *Wajah Bandoeng Tempo Doeloe* (Bandung: PT. Granesia, 1985).
_____, *Semerbak Bunga di Bandung Raya* (Bandung: PT. Granesia, 1986).

Denny Santika

- Paramastri, Patricia Petty, *Perkembangan Tata Kota Malang Masa Kolonial (1914-1940)* (Yogyakarta: Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah FIB UGM, 2002).
- Prameswari, Dewi Retno, dkk., "Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya: Masjid Raya Cipaganti Karya C. P. Wolff Schoemaker", *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 10.1 (2021). <https://doi.org/10.32315/jlbi.v10i01.16>.
- Rufidah, Eva, *Perkembangan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Perkotaan Bandung 1906-1930* (Yogyakarta: Tesis Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2003).
- Salim, Agus, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001).
- Sharer, J. Robert dan Wendy A, *Archaeology: Discovering Our Past* (Boston: Mc Graw Hill, 2003).
- Silas, Johan "Perjalanan Panjang Indonesia dalam dan Sekitar Abad XX". Dalam *Kota Lama, Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan* (Jakarta: Penerbit Ombak, 2003).
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1906 No.121
- Subroto, Ph, "Studi Tentang Pola Permukiman Arkeologi Kemungkinan-Kemungkinan Penerapannya di Indonesia". Dalam *Artikel PIA*. (Jakarta: Puslitarkernas, 1995).
- Suminto, H. Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1996).
- Suryo, Djoko, "Penduduk dan Perkembangan Kota Yogyakarta 1900-1990". Dalam *Kota Lama, Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan* (Jakarta: Penerbit Ombak, 2003).
- Tim Penyusun. *Masjid Kuno Indonesia*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999).
- Tim Penyusun, "Membangun Manusia Bermartabat". Dalam *Profil Masjid Raya Cipaganti Kota Bandung Propinsi Jawa Barat* (Bandung: Sekertaris Masjid Raya Cipaganti, 2004).
- Yusuf Elba, Mundzirin, *Mesjid Tradisional di Jawa* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983).